PELATIHAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE ANGKATAN I

LAPORAN EVALUASI
SPBE KANTOR WILAYAH BALI

Laporan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Berbasis Manajemen Layanan SPBE Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

IDENTITAS PESERTA

NAMA LENGKAP
Desak Putu Sri Wulandari, S.Kom.

NIP
200107312025062009

JABATAN / NO. ABSEN
Pranata Komputer Pertama / No. 15

SATUAN KERJA
Kanwil Kementerian Hukum Bali

Latar Belakang, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pengantar

- **Latar Belakang & Urgensi:** Transisi paradigma dari 'Aplikasi Berjalan' ke 'Layanan yang Dapat Diandalkan'. Operasional Bidang Pelayanan KI Kanwil Bali memanfaatkan portal DJKI Pusat, aplikasi Kanwil (SAID, PRIMA, DIKUTA), serta Google Workspace dan Google Form (permohonan mediasi sengketa KI) yang masih parsial sehingga perlu evaluasi Manajemen Layanan SPBE
- **Maksud & Tujuan:** Pemetaan objektif tata kelola digital untuk mengidentifikasi kondisi saat ini & kondisi yang diharapkan, menganalisis kesenjangan, serta menyusun rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- **Ruang Lingkup (3 Pilar Utama):**
  1. **Pelayanan Pengguna SPBE** (permohonan mediasi sengketa KI via *Google Form*).
  2. **Pengoperasian Layanan SPBE** (repositori arsip digital *Google Drive/Sheets*).
  3. **Pengelolaan Aplikasi SPBE** (interoperabilitas sistem operasional KI dengan DJKI dan Kanwil).

Dasar Hukum : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE; Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum; Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital; dan Peraturan Menteri Nomor M.HH-07.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Manajemen Layanan SPBE

Identifikasi

Identifikasi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan,dan *gap analysis*

No	Kondisi Diharapkan	Kesenjangan (GAP) dan Risiko	Pilar Pelayanan SPBE	Kondisi Saat Ini
1	Layanan permohonan mediasi terintegrasi di portal SAID dengan *Service Desk* & SLA.	Tanpa enkripsi data & *tracking status* Risiko : Tinggi	Pelayanan Pengguna	Form permohonan mediasi KI via *Google Form publik*; tanpa SLA & prioritas
2	Repositori E-Arsip terpusat Kemenkum dengan pemantauan ketersediaan 24/7.	Risiko *data loss* & ketiadaan *backup* instansi. Risiko: Sangat Tinggi	Pengoperasian Layanan	Dokumen penting (PKS, Laporan) disimpan di Google Drive personal/unit
3	Portal SAID menyerap data statistik KI secara otomatis via API (real-time).	Sistem terpisah (*siloed*); belum ada API otomatis. Risiko: Sedang	Pengelolaan Aplikasi	Data statistik KI diinput manual dari *Google Sheets* ke *dashboard SAID*

Kesimpulan Evaluasi

3 Pilar Utama Manajemen Layanan

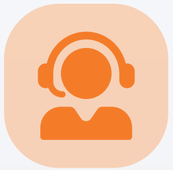
- **Transisi Paradigma Layanan SPBE:** Pemanfaatan teknologi di Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Bali masih berfokus pada pendekatan "Aplikasi Berjalan" (dapat diakses) dan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi "Layanan yang Dapat Diandalkan" (terintegrasi, aman, terstandar, dan memberi kepastian).
- **Evaluasi Pilar Pelayanan Pengguna:** Google Form permohonan mediasi belum memenuhi standar Service Desk pemerintah karena tidak dilengkapi enkripsi data, penentuan prioritas (Urgensi + Dampak), SLA waktu respons, serta fitur tracking ID bagi pelapor.
- **Evaluasi Pilar Pengoperasian Layanan:** Ketergantungan operasional pada Google Drive/Sheets publik menimbulkan risiko data security dan data ownership, ketiadaan pembatasan hak akses berbasis peran (RBAC), serta tanpa skema backup harian/mingguan dan DRP instansi.
- **Evaluasi Pilar Pengelolaan Aplikasi:** Terjadi keterpisahan sistem (siloed systems) antara portal DJKI Pusat, aplikasi Kanwil (PRIMA, DIKUTA, SAID), dan operasional KI, yang menyebabkan penginputan data statistik ke SAID masih dilakukan secara manual.

Rekomendasi Strategis



Pelayanan Pengguna SPBE

Integrasi Modul Permohonan Mediasi KI terenkripsi di portal SAID Kanwil Bali; penerapan SOP Service Desk terstandar (SLA, skala prioritas, alur eskalasi); serta penyediaan fitur tracking system bagi pemohon.



Pengoperasian Layanan SPBE

Migrasi bertahap dokumen arsip vital (PKS, MoU, Laporan) ke Government Cloud / Repositori E-Arsip Resmi Kemenkum; penerapan hak akses berbasis peran (RBAC); serta skema backup otomatis terintegrasi kebijakan DRP Kemenkum.



Pengelolaan Aplikasi & SDM

Pembangunan jalur API pertukaran data otomatis antara basis data KI dan Dashboard SAID (Single Source of Truth); penyelesaian peta risiko SPBE; serta penyelenggaraan pelatihan kompetensi SDM di bidang tata kelola layanan, keamanan informasi, dan pengelolaan data digital.

Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Pilar SPBE Terkait	Indikator Output	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	Inventarisasi & Pemetaan Risiko Data Google Drive	Pengoperasian Layanan	Dokumen Inventarisasi & Peta Risiko SPBE	Triwulan IV 2026	Bidang KI & Tim TI
2	Migrasi Arsip Digital ke Cloud Resmi Kemenkum	Pengoperasian Layanan	Seluruh dokumen tersimpan di Repositori Resmi	Triwulan IV 2026	Bidang KI & Tim TI
3	Pengembangan Form Permohonan Mediasi KI di SAID	Pelayanan Pengguna	Modul Form Permohonan Mediasi di SAID	Triwulan I 2027	Bidang KI & Tim TI
4	Penyusunan SOP Service Desk & SLA Mediasi KI	Pelayanan Pengguna	Dokumen SOP, Matriks Prioritas, & SLA Mediasi	Triwulan I 2027	Bidang KI & Tim TI
5	Pembangunan API Interoperabilitas Data KI ke SAID	Pengelolaan Aplikasi	Penarikan Data Statistik KI ke SAID Otomatis	Triwulan II 2027	Tim TI
6	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM SPBE	SDM SPBE	Sertifikat / Peningkatan Kapasitas SDM	Triwulan II 2027	Bidang KI & Tim TI

Penutup dan Sinergi Tindak Lanjut

Penutup

- **Sinergi Internal Kanwil Kemenkum Bali:** Kolaborasi erat antara Divisi Pelayanan Hukum (Bidang Pelayanan KI) dan Divisi Administrasi (Tim TI/Humas) untuk pengembangan portal SAID dan migrasi data.
- **Dukungan Pusat (DJKI & Pusdatin Kemenkum):** Koordinasi penyediaan infrastruktur Government Cloud, dan standarisasi SOP *Service Desk.*
- **Penguatan Kapasitas SDM:** Peningkatan kompetensi pegawai secara konsisten untuk mewujudkan budaya kerja berbasis digital yang aman dan akuntabel.

"Transformasi digital yang efektif akan mewujudkan pelayanan publik Kekayaan Intelektual di wilayah Bali yang berkualitas, transparan, dan terpercaya."

TERIMAKASIH

MATUR SUKSMA